BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom ***(Gemente)*** atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah ***Bandoegsche Electriciteit Maatschappij*** (BEM) yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920, perusahaan perseroan ***Gemeenshaapplijk Electricitient Bedrijp Voor Bandoeng*** (GEBEO) menggantikan BEM. Penggatian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophusein-No. 213 tanggal 31 Desember 1919. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh ***Djawa Denki Djigo Sha Bandoeng Shi Sha***, dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1957 merupakan awal penguasaan pengelolaan perlistrikan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan di mulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

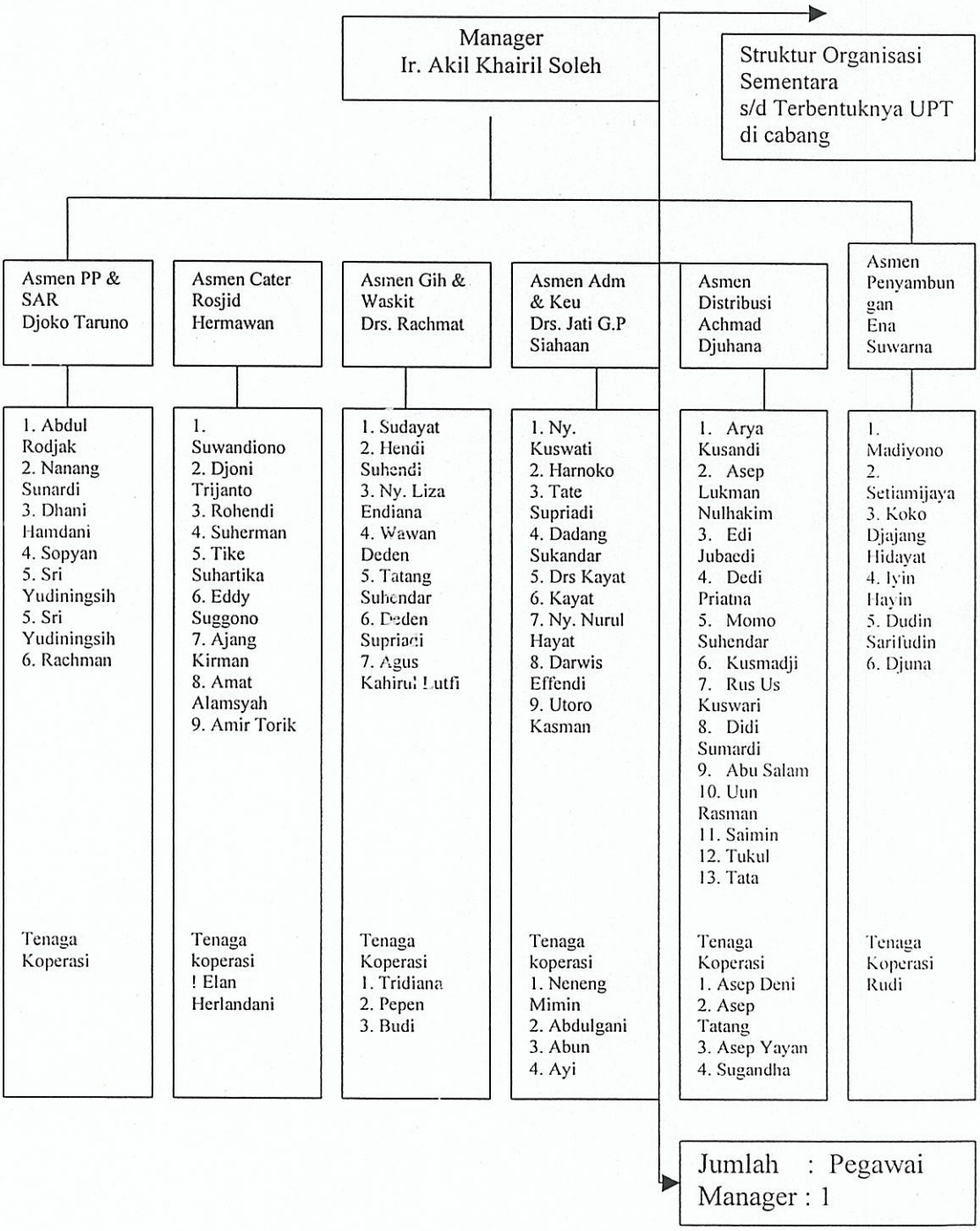
Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI dengan dikukuhkan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 1958 Jo peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang ***penentuan perusahaan listrik dan gas milik belanda***. Tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 dibentuk badan pimpinan umum perusahaan listrik negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, Di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Tahun 1972, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah N0.18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status

PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, mengacau pada peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang ***organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara.*** Maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI No. 05/DIII/Sek? 1975, PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994. Maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi perusahaan perseroan (persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai Akte pendirian. Selanjutnya, sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 28K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Gambar 2.2: Struktur organisasi
PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat
Unit Pelayanan Bandung Timur



Data ini telah diolah oleh penulis dan sumber ini diperoleh dari PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur

2.3 Deskripsi Jabatan PT. PLN

Karena begitu banyaknya unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat ini, maka penulis hanya akan menerangkan tugas pokok dan fungsi-fungsi berdasarkan struktur organisasi diatas. Adapun "Deskripsi Jabatan" pada perusahaan yang penulis tinjau adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Administrasi & Keuangan

   Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

   A. Memimpin, mengurus dan mengelola administrasi & keuangan sesuai dengan maksud dan tujuan administrasi & keuangan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dari hasil guna administrasi & keuangan.

   B. Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus administrasi & keuangan yang telah digariskan oleh Direksi.

   C. Menetapkan kebikjasanaan administrasi & keuangan sesuai dengan kebikjasanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi.

   D. Mengadakan dan memelihara tata buku dari administrasi & keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.

   E. Menetapkan gaji/pensiun hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pembantu Pimpinan.

   Bidang kepegawaian dan administrasi.

   Melaksanakan kegiatan kepegawaian dan administrasi secara keseluruhan sesuai dengan kebikjasanaan pimpinan mencakup sekretariat dan umum, bagian umum, dan hubungan masyarakat.

   A. Bagian Kepegawaian

      Menangani, mengawasi, dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, kesejahteraan pegawai keamanan dan keselamatan pegawai.

   B. Seksi Tata Usaha Kepegawaian

Melaksanakan penerimaan, pengangkatan, penempatan pemidahan pemberhentian pegawai dan administrasi gaji/upah serta mengelola data kepegawaian.

- Bagian Akuntansi

  Tugas pokoknya adalah :

  A. Menangani dan mengawasi pencatatan, penggolongan, pengkhtisaran dan penyusunan laporan keuangan atas dokumen keuangan.
  B. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan keuangan pada umumnya antara lain meliputi : pencatatan, penggolongan pengikhtisaran dan menyusun laporan keuangan atas data dan dokumen keuangan.

- Bagian Keuangan

  Tugas pokoknya adalah :

  A. Melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan kebikjasanaan pemimpin.
  B. Menyusun anggaran yang menggunakan metodologi data yang akurat terhadap pembelanjaan dan pengendalian keuangan pengusahaan tata usaha langganan termasuk sistem pelayanan berdasarkan standar akuntansi keuangan.

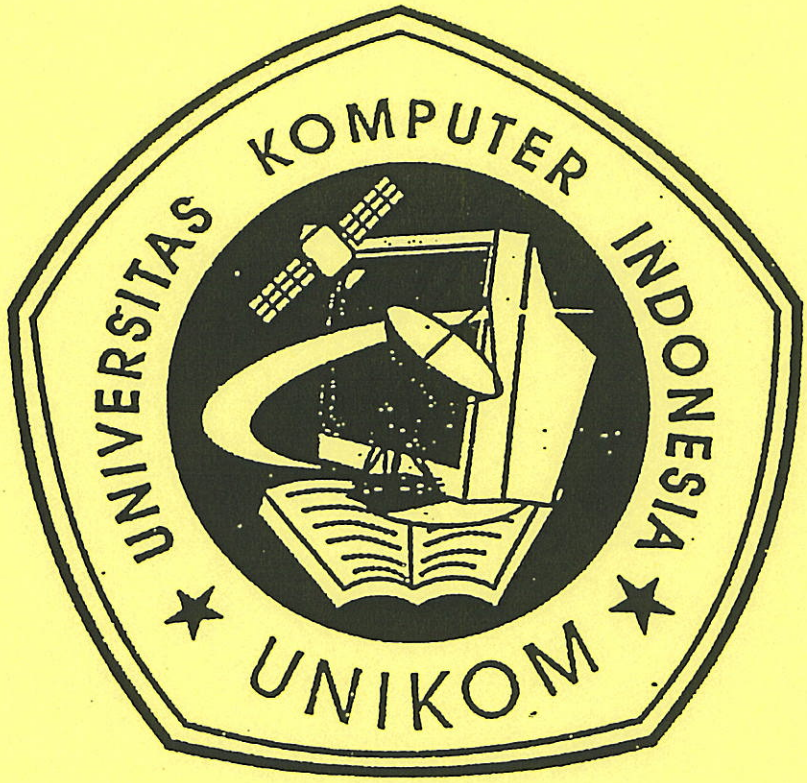
2.4 Aspek Kegiatan PT. PLN

Pada intinya, aspek kegiatan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah menjual produk berupa energi listrik yang bisa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan. Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dijual kepada pelanggan dibagi ke dalam beberapa golongan tarif yaitu : Tarif S (kepentingan sosial), Tarif R (rumah tangga kecil dan besar), Tarif B (bisnis), Tarif I (industri) dan Tarif P (pemerintah dan penerangan jalan umum).

Berdasarkan Keppres No 83 tahun 2001, ditambahkan golongan tarif baru, yaitu Tarif T (traksi/kereta listrik) dan Tarif C (curah). Untuk keperluan khusus, PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat menyediakan golongan tarif (Multiguna) yang diperuntukan bagi tenaga listrik dengan persyaratan khusus atau

spesifik serta memberi nilai tambah bagi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat maupun bagi pelanggan. Transaksi multiguna sangat menguntungkan, karena dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak melalui proses negoisasi yang transparan dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Jenis transaksi multiguna terdiri dan transaksi energi listrik maupun non energi listrik. Transaksi energi listrik meliputi multiguna ekspor-impor, misiman, prabayar, beban dapat diatur, listrik hari libur, transaksi JBTD. Transaksi non energi listrik adalah penyediaan tingkat keandalan layanan, penyediaan fasilitas ketenagakerjaan dan penyediaan layanan jasa ketenagalistrikan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM